



**PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

TESIS

FADLON HUSEIN

1520922060

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018



**PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

FADLON HUSEIN

1520922060

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Fadlon Husein
NRP : 1520922060
Tanggal : 14 Pebruari 2018

Jakarta, 14 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Fadlon Husein

::

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadlon Husein
NRP : 1520922060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

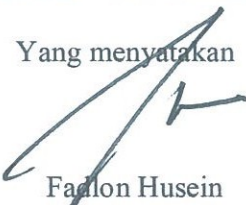
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Pebruari 2018

Yang menyatakan

Fadlon Husein

...

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Fadlon Husein

NRP : 1520922060

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ketua Penguji




Dr. Muhammad Arafah Sinjar, SH, M.Hum
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yaya Larina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14 Pebruari 2018

PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

FADLON HUSEIN

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan tentu harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa, namun berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Audit Investigatif yang terdiri dari Audit Finansial dan Audit Performa untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 2. Untuk menganalisis kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik 3. Untuk menganalisis menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa meliputi Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan. 2) Kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik yaitu: a. Kekurangan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, b. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, c. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; d. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana yaitu dengan melihat dugaan penyimpangan dalam tindakan hukum administrasi negara tersebut memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum atau tidak melalui Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPK.

Kata Kunci : Administrasi, Pidana, Pengadaan

**IMPLEMENTATION OF CHOICE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS
AND CRIMINAL SANCTIONS IN PROCUREMENT OF
GOVERNMENT SERVICES IT POTENTIALLY
DISADVANTAGES STATE FINANCE**

FADLON HUSEIN

ABSTRACT

The rapid development must be balanced with the role of government in providing various forms of goods, services, but various irregularities often occur in the process of procurement of goods and services Government. The frequent occurrence of irregularities on the provision of goods / services Government can be indicated from the many handling of corruption. To determine whether a criminal sanction or administrative sanction is applied, an audit by an authorized institution, namely the Supreme Audit Board (BPK), is an Investigative Audit consisting of a Financial Audit and a Performance Audit to determine whether there is a state loss or not and determining whether the state financial loss is caused by an unlawful act or not. The purpose of this study is 1. To know the basic consideration elements of the state financial losses in cases of Crime Acts of Co-op 2. To analyze the criteria of State Financial Losses based on Public Finance Law 3. To analyze determine the irregularities in the procurement of goods / services government subject to administrative sanctions or criminal sanctions. With the normative juridical research method it is known that 1. The basic consideration of the element of financial loss of the State in the case of Corruption in the Procurement of goods and services includes Every person, In order to benefit himself or others or a corporation, Abusing use of existing powers, opportunities or means to him or her due to position or position, which may be detrimental to the finances of the State or the economy of the country and As a person who commits or participates in doing so. 2) Criteria of State Financial Losses based on Public Finance Law are: a. Lack of all rights and obligations of the State which can be assessed by money, b. State assets / territories which are self-managed or by others in the form of money, securities, accounts receivable, goods, and other rights which can be assessed by money, c. Wealth of other parties controlled by the government in the framework of the administration of governmental duties and / or public interest; d. Wealth of other parties obtained by using the facilities provided by the government. Determining irregularities in the procurement of goods / services of government subject to administrative sanctions or criminal sanctions is to see allegations of irregularities in legal action the state administration meets the criteria of action against the law or not through Investigative Audits conducted by BPK.

Keywords : Administration, Criminal Procurement

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA “

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Muhammad Arafah Sinjar, SH. M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Dr. Moh. Hatta. SH, M.Kn selaku, Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 14 Pebruari 2018

Fadlon Husein

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	7
I.3. Tujuan Penelitian.....	7
I.4. Manfaat Penelitian.....	8
I.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
I.5.1. Kerangka Teori.....	8
I.5.2. Kerangka Konsep.....	11
I.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
II.1. Penerapan Sanksi.....	12
II.1.1. Pengertian Penerapan Sanksi.....	15
II.1.2. Jenis-Jenis Sanksi.....	19
II.1.2.1. Sanksi Pidana.....	19
II.1.2.2. Sanksi Perdata.....	19
II.1.2.3. Sanksi Administrasi.....	19
II.1.2.4. Sanksi Pidana Administratif.....	21
II.2. Tindak Pidana Korupsi.....	
II.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
II.2.2. Pengertian Korupsi.....	28
II.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
II.3. Pengadaan Barang/Jasa.....	33

II.3.1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa	33
II.3.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	37
II.3.3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa.....	41
II.4. Kerugian Keuangan Negara	43
II.4.1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara	43
II.4.2. Tahap-Tahap Perhitungan Kerugian Negara.....	45
II.4.3. Pengaturan Mengenai Dapat Merugikan Keuangan Negara	52
II.5. Keuangan Publik	54
II.6. Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Lingkup Korupsi.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	62
III.1. Tipe Penelitian	62
III.2. Sifat Penelitian	62
III.3. Sumber Data.....	63
III.4. Metode Pengumpul Data.....	64
III.5. Metode Analisis data.....	65
BAB IV. SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	65
IV.1. Dasar Pertimbangan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	65
IV.2. Kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik.....	108
IV.3. Sanksi Administrasi Atau Sanksi Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	122
BAB V. PENUTUP	130
V.1. Simpulan	130
V.2. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP